

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan ekonomi adalah rangkaian usaha dan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan menjamin pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, peningkatan hubungan ekonomi regional dan kebutuhan untuk mentransfer layanan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Selain itu, pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran di negara berkembang (Todaro, 2011). Artinya, kemiskinan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dari perspektif ekonomi baru.

Kemiskinan adalah keadaan ketidakmampuan ekonomi untuk mencapai taraf hidup rata-rata penduduk setempat. Kemiskinan dapat timbul karena rendahnya pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik primer maupun sekunder, sekaligus rendahnya kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menurut Alhumani (2006), definisi baru tentang kemiskinan bukan lagi persoalan kurangnya pendapatan, ini lebih rumit yaitu tentang ketidakberdayaan, ketiadaan pengetahuan, dan keterampilan, serta kurangnya akses pendanaan, dan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa

kemiskinan merupakan masalah kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, harus dilakukan upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan secara komprehensif, meliputi berbagai aspek kehidupan dan kemasyarakatan serta dilakukan secara terpadu (Nasir & Saichudin, 2009).

Menurut pandangan Islam, kemiskinan adalah realitas yang dihadapi semua orang, muslim maupun non-muslim. Islam menganggap bahwa masalah tidak tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan adalah definisi dari masalah kemiskinan. Berdasar Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 268, kemiskinan adalah ujian iman yang diberikan kepada setiap orang. Jika orang tidak dapat mengatasi masalah kemiskinan, maka perbuatan keji digunakan sebagai alasan kepedulian untuk mengurangi kemiskinan.

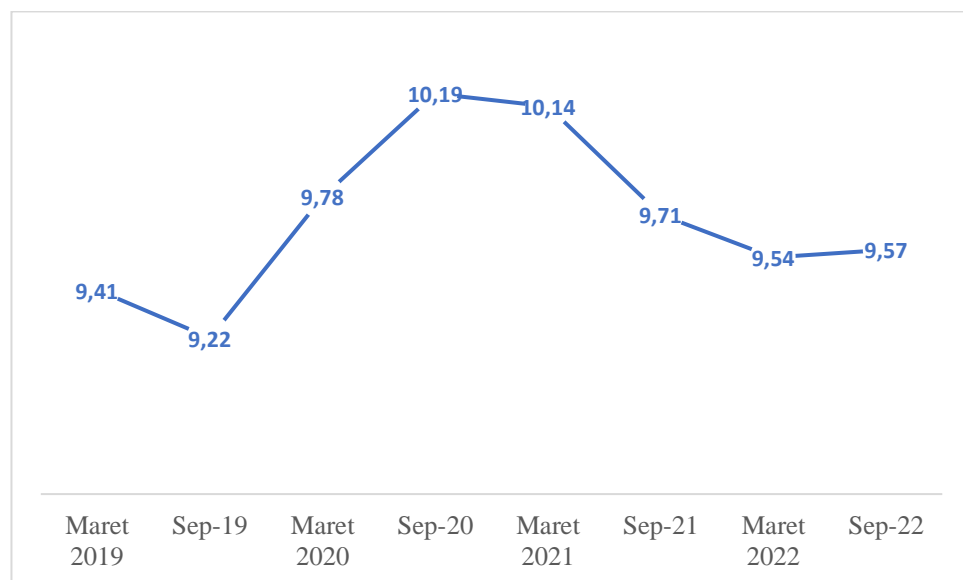
Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (1) Ayat 268:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَقَضَاءً ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.*

Badan Pusat Statistik (2022) mengukur kemiskinan di Indonesia menggunakan sistem pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Suatu masyarakat tergolong miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah penjumlahan garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Garis kemiskinan makanan diperoleh dengan menghitung jumlah dari nilai-nilai pengeluaran 52 produk makanan utama yang dikonsumsi

masyarakat setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan garis kemiskinan non-makanan diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai kebutuhan minimum untuk barang-barang non-makanan tertentu seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dengan metode ini, dapat dihitung persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.



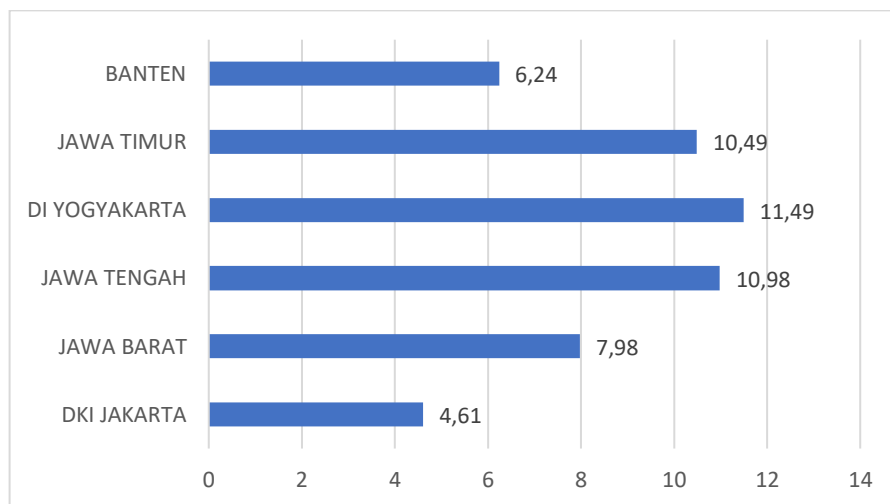
Sumber: BPS Indonesia, 2022 diolah

GAMBAR 1.1.

Grafik Tingkat Kemiskinan di Indonesia (Persen)

Grafik di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin pada periode Maret 2019 hingga September 2022 mengalami fluktuasi. Pada periode Maret 2019 hingga September 2019, persentase penduduk miskin sebesar 9,22% naik menjadi 10,19% pada September 2020. Kenaikan itu terjadi karena pada saat itu terjadi wabah pandemi Covid-19 sehingga mengurangi kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh, meningkatkan jumlah penduduk miskin, memperluas kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan pengangguran secara nasional.

Kemudian, pada Maret 2021 mulai mengalami penurunan walau tidak signifikan, hanya sebesar 0,05%. Pada periode September 2021 turun menjadi 9,71% dan pada Maret 2022 menjadi 9,54%. Dari jumlah tersebut, upaya pengentasan kemiskinan penting dilakukan di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, terutama di Pulau Jawa yang merupakan pusat pembangunan ekonomi.



Sumber: BPS Indonesia, 2022 diolah

GAMBAR 1.2.
Grafik Tingkat Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2022
(Persen)

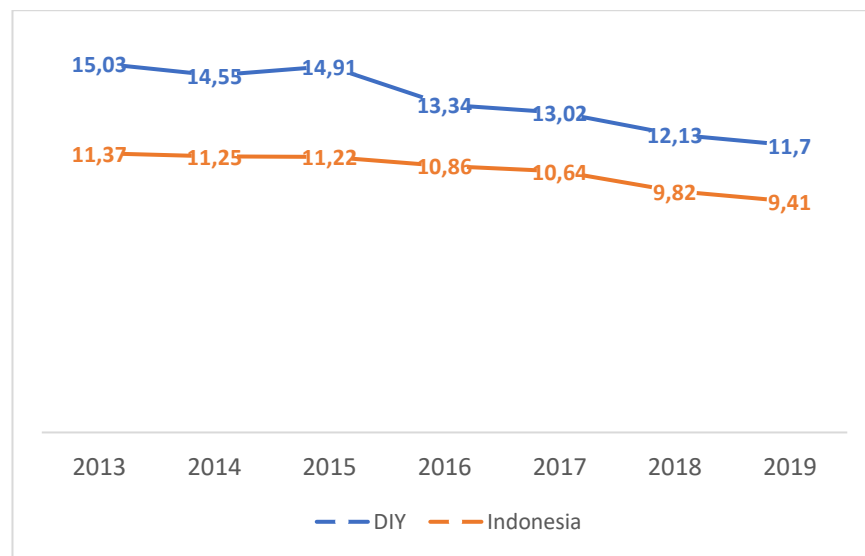
Gambar 1.2. menunjukkan bahwa dari 6 provinsi di Pulau Jawa, persentase penduduk miskin pada periode September 2022 terbesar berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni dengan persentase sebesar 11,49%, sedangkan persentase penduduk miskin terendah adalah Provinsi DKI Jakarta dengan persentase 4,61%. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Pulau Jawa.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah otonom yang telah mencapai pelaksanaan desentralisasi asimetris melalui pemberian status daerah istimewa dan tambahan kewenangan keistimewaan. Hal ini berimplikasi pada status daerah sebagai daerah otonom dan daerah istimewa. Kewenangan keistimewaan diberikan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta didukung dengan APBN dalam bentuk Dana Keistimewaan. Pemanfaatan Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta digunakan untuk membiayai program kewenangan keistimewaan, yaitu urusan tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur; kelembagaan; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Salah satu capaian urusan tata ruang Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta tahun anggaran 2013-2019 yaitu pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di D.I Yogyakarta sepanjang 116,07 km, untuk daerah Kulon Progo sepanjang 23,15 km, Bantul sepanjang 16,58 km, dan Gunungkidul sepanjang 76,34 km.

Salah satu tujuan penyelenggaraan Dana Keistimewaan adalah untuk mencapai ketentraman dan kesejahteraan, namun realitanya kesejahteraan masyarakat masih belum sepenuhnya diterima karena tingkat kemiskinan masih tinggi. Pada awal adanya Dana Keistimewaan tahun 2013, tingkat kemiskinan di D.I Yogyakarta sebesar 15,03% hingga tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 11,7%, namun jika dibandingkan dengan tingkat

kemiskinan secara nasional per September 2019 adalah sebesar 9,41%. Artinya tingkat kemiskinan di D.I Yogyakarta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional.



Sumber: BPS, 2022 diolah

GAMBAR 1.3.
Grafik Perbandingan Tingkat Kemiskinan DIY dengan Indonesia
Tahun 2013-2019 (Persen)

Tingkat kemiskinan yang tinggi berhubungan dengan rendahnya infrastruktur yang memadai di berbagai wilayah, di mana akses infrastruktur berperan penting dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Kondisi infrastruktur sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi dan sosial untuk berinvestasi di daerah yang bersangkutan. Indikator pembangunan infrastruktur penting adalah saluran irigasi, akses listrik, dan kondisi transportasi jalan utama. Indikator lainnya adalah akses yang sama

terhadap suatu usaha atau pekerjaan, seperti adanya lembaga keuangan dan industri (Deffrinica *et al.*, 2019).

Menurut Haughton dan Khandker (2009), kemudahan akses ke infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan layanan penting lainnya seperti sekolah dan rumah sakit memiliki dampak yang signifikan, berdampak besar pada kualitas hidup masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. Ketika masyarakat memiliki akses jalan, akses mereka ke pasar akan lebih besar dan peluang yang mereka miliki menghasilkan pendapatan nyata akan lebih tinggi. Hal yang sama berlaku untuk akses sanitasi yang memadai yang mempengaruhi kondisi kesehatan dan berimplikasi pada peningkatan kualitas manusia. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang lambat dapat menjadi penghambat pembangunan dan pertumbuhan secara umum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan infrastruktur berperan dalam penanggulangan kemiskinan secara langsung maupun tidak langsung.

Penelitian mengenai pengaruh infrastruktur terhadap kemiskinan sudah beberapa diteliti. Berdasarkan penelitian sebelumnya, setidaknya terdapat beberapa perbedaan pendapat. Penelitian Fardilla dan Masbar (2020) mengenai pengaruh infrastruktur jalan, listrik, sekolah dan PDRB terhadap kemiskinan di Aceh, penelitian ini mengungkapkan bahwa infrastruktur jalan dan sekolah berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan listrik dan PDRB tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Kemudian penelitian Purnomo (2019), Purnomo *et al.*, (2021) di Daerah Istimewa Yogyakarta, mengungkapkan bahwa infrastruktur ekonomi berpengaruh terhadap

kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan infrastruktur pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Selain itu, penelitian Putra dan Yasa (2021) di Kabupaten/Kota di Bali terkait pengaruh infrastruktur dan pendidikan terhadap kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, mengungkapkan bahwa infrastruktur dan pendidikan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan, namun infrastruktur tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Sari *et al.*, (2017), Nurmala dan Hutagaol (2022), Pramono dan Marsisno (2018), Deffrinica *et al.*, (2019), dan Fagbemi *et al.*, (2022) mengungkapkan bahwa infrastruktur berpengaruh menurunkan kemiskinan. Penelitian Marhaeni *et al.*, (2019), Rahayu *et al.*, (2019), Purnomo *et al.*, (2020), Hidayat *et al.*, (2019), dan Yuliani *et al.*, (2019) mengungkapkan bahwa infrastruktur seperti, listrik, jalan, air bersih, dan sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, secara garis besar adanya infrastruktur dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2021**”.

B. Batasan Masalah

Cakupan penelitian yang luas ini menuntut peneliti untuk mempersempit masalah agar pembahasan dapat terfokus pada isu-isu kunci yang digariskan dalam rumusan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan yang digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan persentase penduduk miskin di kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta.
2. Terdapat 4 infrastruktur yang digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian, yaitu:
 - a. Infrastruktur jalan, sebagai tolok ukurnya menggunakan panjang jalan kabupaten menurut jenis permukaan jalan dalam satuan kilometer (km).
 - b. Infrastruktur listrik, sebagai tolok ukurnya menggunakan jumlah pelanggan listrik.
 - c. Infrastruktur air bersih, sebagai tolok ukurnya menggunakan volume air yang didistribusikan dalam satuan m³.
 - d. Infrastruktur pendidikan, sebagai tolok ukurnya menggunakan jumlah gedung SD, SMP, SMA/SMK dalam satuan unit.

3. Penelitian ini hanya menggunakan data periode 2012-2021 yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh panjang jalan terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh jumlah pelanggan listrik terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh volume air bersih didistribusikan terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Bagaimana pengaruh jumlah gedung sekolah terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh panjang jalan terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pelanggan listrik terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh volume air bersih didistribusikan terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah gedung sekolah terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau menambah ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait pengentasan kemiskinan di daerah. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan pengembangan penelitian.